

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan nasional secara terus menerus di segala bidang, demi meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang dilakukan harus merata di semua tempat, oleh sebab itu, pemerintah menerapkan otonomi daerah agar setiap daerah dapat mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana atau biaya yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah diterima dari berbagai sumber, dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan daerah yang terpenting adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan peraturan otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya dan melaksanakan pembangunan daerah adalah Kota Bandung. Bandung adalah kota yang terkenal dengan daerah wisata baik itu wisata alam, wisata kuliner maupun wisata rekreasi lainnya. Tempat wisata yang banyak menjadi salah satu alasan Kota Bandung sering mendapat kunjungan banyak wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung mengakibatkan jumlah kendaraan semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan tempat parkir sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan di jalan raya.

Jumlah kendaraan serta jumlah tempat rekreasi yang cukup banyak mempengaruhi jumlah pajak parkir yang dipungut pemerintah dan akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Pajak parkir kendaraan di Kota Bandung diterapkan berbagai tempat, antara lain; di pusat perbelanjaan, hotel, tempat wisata, restoran, factory outlet ataupun tempat makan. Pemerintah harus menerapkan tarif dan peraturan yang tepat untuk pajak parkir agar mendapatkan hasil yang maksimal

serta sesuai dengan kemampuan masyarakat sebagai para pengguna jasa parkir itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh tentang pajak parkir kendaraan di Kota Bandung dalam penelitian dengan judul: **Pengaruh Pajak Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2006 – 2010 (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menghitung Pajak Parkir di Kota Bandung?
2. Berapa besar jumlah target Pajak Parkir yang ditetapkan dan berapa jumlah realisasi Pajak Parkir yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2006 – 2010?
3. Berapa persentase kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2006 – 2010?
4. Apakah Pajak Parkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengetahui perhitungan Pajak Parkir Kota Bandung
2. Mengetahui jumlah target dan realisasi Pajak Parkir yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk tahun 2006 - 2010.
3. Mengetahui besar kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Mengetahui pengaruh Pajak Parkir Kota Bandung terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Bandung untuk lebih dapat memaksimalkan pendapatan daerah terutama dari pajak parkir.

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan, khususnya pajak parkir.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri atas:

a. Bab I

Berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan serta kegunaan penelitian dari pengaruh pajak parkir kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2006 – 2010.

b. Bab II

Berisi tentang penjelasan atas teori-teori yang mendukung seputar Pajak, Pajak Daerah serta Pendapatan Asli Daerah terutama untuk Kota Bandung, kerangka penelitian dan penyusunan hipotesis.

c. Bab III

Berisi aspek-aspek penelitian yang akan dikembangkan, yaitu; objek penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data.

d. Bab IV

Berisi tentang hasil pengolahan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan evaluasi implikasi dari hipotesis yang telah dibuat.

e. Bab V

Berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian berdasarkan hasil yang telah didapatkan.